

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: W3-A/ /OT.01.1/ /2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memenuhi kriteria SMART;

1. Telah dilakukannya asistensi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021 oleh evaluator Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan perubahannya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Straegis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu IKU tanggal …. April 2022 tentang Pembahasan IKU PTA Padang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022;

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024;

KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap subbagian dan kepaniteraan muda untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

 1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;

 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari Pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal April 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PTA PADANG

 NOMOR : W3-A/ /OT.01.1/XI/2021

 TANGGAL : NOVEMBER 2021

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

| **KINERJA UTAMA** | **INDIKATOR KINERJA** | **PENJELASAN** | **PENANGGUNG JAWAB**  | **SUMBER DATA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** | * 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 | $$\frac{Jumlah Perkara yang diseleseikan tepat waktu}{Jumlah Perkara yang diseleseikan} x 100\%$$Catatan:1. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
2. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
3. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
4. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
 | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * 1. Pesentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 | $$\frac{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}{Jumlah Perkara yang diselesaikan} x 100\%$$Catatan:1. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding
2. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
3. Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
 | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| * 1. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan
 | $$Index Persepsi Kepuasan Stakeholder$$Catatan:1. PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80.
3. *Stakeholder* adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.
 | Panitera | Laporan Bulanan danLaporan Tahunan |
| **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara** | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | $$\frac{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}{Jumlah putusan yang dikirim} x 100\%$$Catatan:1. Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.
2. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
 | Panitera | Laporan Bulanan danLaporan Tahunan |

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : November 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**PADANG**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP. 195508261982031004